

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Pengurusan Direksi atas perseroan, dapat dibedakan yaitu perbuatan pengurusan sehari-hari yang merupakan wewenang murni Direksi yang tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham dan perbuatan pengurusan yang mengenai kepemilikan merupakan perbuatan khusus yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham. Namun dalam praktik sukar untuk membedakan perbuatan pengurusan dan perbuatan kepemilikan. Yang dalam pengaturan tentang tugas dan wewenang Direksi dalam standarisasi Anggaran Dasar kurang jelas. Rangkaian penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis wewenang dan tugas jabatan serta tanggung jawab Direksi dalam tataran teori hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang perseroan terbatas. Pentingnya perumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk memberikan batasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Direksi. Merumuskan perbuatan-perbuatan kepemilikan, sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dirumuskan dalam perbuatan kepemilikan harus dianggap sebagai perbuatan pengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: Wewenang, Tanggung Jawab, Direksi, Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

According to article 1 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Company. The Directors is authorized organ of the company and are fully responsible for the management of the company for the benefit of the company, in accordance with the purposes and objectives of the company and to represent the company in and out of court. Handling of Directors on the company, can be distinguished, namely the maintenance of everyday actions which are purely Directors authority which does not require the approval of the Board of Commisioners or the General Meeting of Shareholders and actions regarding the maintenance of the property, is a special act that require the approval of the Board of Commisioners or the General Meeting of Shareholders. But in practice, it is difficult to distinguish the actions of management and ownership deeds. That in the regulations concerning the duties and authority of the Directors in the standardization Statutes less clear. The series of this thesis aims to analyze the powers and duties and the responsibilities of the Directors at the level of legal theory. The research method used by the writer is normative, which refer to the legislation and books on limited company. The importance of the formulation of article 3 of the Articles of Association to impose limits on the authority and responsibilities of the Directors. Formulating the deeds of ownership, while deeds that are not defined in the deed of ownership should be considered an act of maintenance in accordance with the Articles of Association and the Law on Limited Company.

Keywords: *Authority, Responsibility, Directors, Limited Company.*